

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rifai, S. H. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Mencederai Keadilan Masyarakat*. Nas Media Pustaka, Makassar.
- Achmad Ruslan. 2023. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, D. M. H., & SH, M. 2022. *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Fakhry Amin, et. al. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Sada Kurnia Pustaka, Serang.
- Hutagalung, S. M. 2022, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Manhaji. Medan.
- Manalu, K. 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Azka Pustaka, Medan
- Martini, 2023, *Sistem Hukum Indonesia*, Jejak Publisher, Sukabumi.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Philip Nonet, Philip Selznick. 2019. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Nusamedia, Jakarta.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sri Wahyuni. 2016. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*. Pustaka Alvabet, Jakarta
- Subekti R. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sulaikin Lubis. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Penerbit Kencana, Jakarta
- Svinarky, I, 2019, *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*, Cv Batam Publisher, Batam
- Tedi Kholiludin. 2009. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi", dan Diskriminasi Hak Sipil*. RaSail Media, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit Sumur,

Bandung.

Yusri Munaf. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Fisipol Universitas Islam Riau.

Zainal Azikin. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Kencana, Jakarta

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Candra Refan Daus & Ismail Marzuki. 2023. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.1.

Cholida Hanum. 2020. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Humani*, Vol. 10, No. 2. Universitas Semarang

Daud Risma, *et.al.* 2023. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama DI Indonesia" *Jurnal Humani*, Vol.13, No.1. Universitas Semarang.

Eneng Juandini. 2023. "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama" *Journal on Education*, Vol.5, No.4.

Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. 2017. "Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Borneo Law Review*, Vol.1 No.2.

Faishal Taufiqurrahman, *et.al.* 2021. "Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan, dan Keputusan" *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 5, No.2.

I Made Dera Januartha, *et. al.* 2023. "Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* dalam Perkara Perdata". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4, No.3.

Inggit AR, A. B. 2019. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah" *Jurnal Restorative Justice*, Vol.3, No.1.

Konardi, S. M. 2017, "Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia".

Yohanes Pattinasarany. 2022. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi". *Jurnal Saniri*, Vol.3 No.1

Skripsi

Alya Salsabila Andaraaini Putri. 2023. Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Skripsi*. Universitas Muslim Indonesia.

Nada Intan Soraya. 2021. Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dwi Ferdiansyah Adi Baskara. 2019. Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Skripsi*. Universitas Wirajaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2011